

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat kini memudahkan manusia untuk mengakses informasi dengan cepat, akurat, dan terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi tidak hanya memudahkan untuk mendapatkan informasi, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, pemerintahan, pendidikan, dan pengelolaan data. Kemajuan teknologi mempermudah dalam menyelesaikan proses yang membutuhkan waktu cepat, dalam mendukung produktivitas dan inovasi di berbagai bidang.

Pemerintah memiliki suatu sistem yang dinamakan dengan *electronics government (e –government)* merupakan nama lain dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Penataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diundangkan pada tahun 2018, bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, serta meningkatkan integrasi dan efisiensi pemerintahan dengan mengintegrasikan teknologi informasi, dan komunikasi (TIK) (Choirunnisa, L 2023). Sistem ini dirancang untuk mengubah dan meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, sektor bisnis, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Implementasi kebijakan memerlukan kemajuan teknologi untuk mewujudkan *good government* melalui konsep *smart city*. Konsep *smart city*

hadir sebagai respons terhadap kebutuhan membentuk identitas kota yang kompetitif, berorientasi pada pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan ekosistem teknologi yang inovatif, terutama melalui pemanfaatan aplikasi digital, menjadi fondasi awal dalam perwujudan kota cerdas. Melalui pendekatan ini, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien, termasuk dalam hal pelayanan kepada pedagang pasar sebagai bagian dari upaya optimalisasi tata kelola kota.

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam kebijakan publik yang menentukan keberhasilan. Proses ini menghubungkan tujuan dengan realisasi kebijakan agar memberikan dampak yang diharapkan. Seiring waktu, penerapan kebijakan berpedoman pada prinsip *good governance* untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis (Sari, D. K., 2021).

Ikatan antara pemerintah dan masyarakat menjadi aspek krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di mana pemanfaatan aplikasi digital berperan sebagai sarana strategis untuk memperkuat hubungan tersebut. Penggunaan teknologi tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari reformasi birokrasi yang menekankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Selain itu, teknologi mendorong kolaborasi antarlembaga atau instansi yang terlibat, sehingga menciptakan sistem

pelayanan publik yang terintegrasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberadaan *e-government* dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu globalisasi. *E-government* menitikberatkan pada kebutuhan (*demand side*) dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga peran pemerintahan dalam perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pemerintahan modern, termasuk pelayanan publik dalam pasar jasa.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan serta menjalankan operasional pemerintahan. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting karena pemerintah harus memberikan berbagai pelayanan di berbagai sektor kepada masyarakat (Kanzunnudin, 2006). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola ekonomi dan keuangan secara mandiri dengan menggali berbagai sumber pendapatan daerah secara optimal.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tepatnya Pasal 1

angka 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah melalui pemungutan yang diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber PAD meliputi antara lain pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber lainnya (Ermawati, 2024). Di antara berbagai sektor tersebut, retribusi pasar menjadi salah satu potensi utama dalam upaya peningkatan PAD.

Hasil dari pengelolaan potensi daerah dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Dari beberapa pendapatan asli daerah tersebut maka retribusi pasar merupakan salah satu yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Sudrajat, Y., 2022). Dari sekian banyak komponen PAD, retribusi merupakan salah satu elemen yang dinilai memiliki daya dorong signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah. Salah satu jenis retribusi yang berperan penting adalah retribusi pasar, yang tergolong dalam kategori jasa umum. Penerimaan ini berasal dari pungutan atas pemanfaatan sarana milik pemerintah daerah, seperti kios, los, dan pelataran. Besar kecilnya tarif yang dikenakan bergantung pada luas area yang digunakan oleh masing-masing penyewa.

Penyelenggaraan layanan pasar sebagai bagian dari pelayanan publik umumnya lebih didominasi oleh prosedur administratif daripada oleh mekanisme persaingan pasar. Mekanisme administratif seringkali memiliki banyak kelemahan seperti mahal, lamban dan tidak berkualitas. Di sisi lain,

mekanisme pasar yang terbuka dan bersifat kompetitif seringkali lebih mampu menyediakan layanan yang murah, cepat tanggap, dan mendorong munculnya inovasi. Meski begitu, pendekatan ini juga punya kekurangan. Salah satu yang paling menonjol adalah kecenderungannya menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap layanan. Karena itu, orientasi pasar tetap perlu diimbangi dengan perhatian pada pengembangan alternatif layanan yang berasal dari inisiatif masyarakat (Dwiyanto, 1996).

Pasar memegang peran strategis sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui mekanisme retribusi pasar. Pendapatan dari retribusi ini diharapkan mampu memberi kontribusi signifikan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa retribusi pasar termasuk dalam jenis pungutan daerah. Secara garis besar, retribusi ini adalah kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada individu maupun badan usaha atas penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen kunci dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena secara konsisten menyumbang angka yang cukup besar setiap tahunnya. Salah satu jenis retribusi yang cukup menonjol adalah retribusi pasar, atau yang dikenal juga sebagai retribusi pelayanan pasar. Pungutan ini dikenakan atas pemanfaatan fasilitas pasar tradisional atau pasar sederhana seperti kios, los, pelataran, dan sarana

perniagaan lainnya yang dikelola dan disediakan oleh pemerintah daerah sebagai ruang aktivitas jual beli (Iqbal, 2024). Di antara berbagai jenis retribusi yang ada, retribusi pasar memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyokong PAD. Namun, meskipun potensinya besar, tata kelola retribusi pasar di sejumlah daerah masih belum berjalan secara optimal dan efisien.

Pemungutan retribusi di sejumlah daerah kini memanfaatkan kemajuan teknologi, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Adapun kendala dalam komunikasi yang buruk antara petugas pemungut dengan dinas perindag maupun antara pedagang dengan petugas pemungut sehingga terjadi adanya miss koordinasi. Kemudian Sumber daya manusia yang kurang mendukung dalam mengoperasikan alat e-retribusi, menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Bila dilihat dari sisi birokrasi yang ada pada siklus koordinasi pasar rata-rata kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil sebuah kebijakan (Suryanata, 2023).

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang berwenang dalam mengelola 15 pasar tradisional yang tersebar di wilayah Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang memiliki pasar tradisional yang menjadi urat nadi perekonomian lokal, pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dindagkop dan UKM Rembang. Sayangnya, dari keseluruhan pasar tersebut, baru satu pasar yang telah memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Tiga pasar Kabupaten Rembang diusulkan berstatus SNI. Ketiga pasar tersebut yaitu Pasar Kragan, Kreatif Lasem, dan Tegaldowo (Kecamatan Gunem) (Mahfudz, 2024). Sehingga

menunjukkan adanya peluang besar untuk peningkatan kualitas dan pengelolaan pasar tradisional di Rembang agar dapat bersaing lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 124) dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non-Tunai APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/1811/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Dan Kreativitas Inovasi Masyarakat Kabupaten Rembang Tahun 2024. Proses pemungutan retribusi disejumlah pasar di Kabupaten Rembang menggunakan e-retribusi.

Program e-retribusi pasar sudah diterapkan di Kabupaten Rembang sejak tahun 2018 sebagai upaya mendukung kemajuan perdagangan dan perkembangan pasar tradisional (Diyah FA, 2023). Program ini merupakan salah satu bentuk respons pemerintah terhadap perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, penerimaan PAD melalui program e-retribusi dinilai kurang optimal.

Mengacu pada data terbaru dari BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 terkait realisasi retribusi daerah, Kabupaten Rembang mencatatkan pendapatan retribusi sebesar Rp1,77 triliun pada tahun 2021 dan berada di posisi ke-27 dari 35 kabupaten/kota. Pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan pendapatan menjadi Rp1,84 triliun pada 2022. Namun, ironisnya, peringkat Rembang justru

turun ke posisi ke-31. Berlanjut di tahun 2023, saat pendapatan kembali naik menjadi Rp1,89 triliun, tetapi peringkatnya tidak beranjak tetap bertahan di posisi ke-31. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan nominal, laju pertumbuhan retribusi Rembang tampaknya masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah.

Menurut data dari BPJS Jawa Tengah, Kabupaten Rembang berada di peringkat diantara Kabupaten lain di Karesidenan Pati. Berikut data realisasi retribusi daerah Kabupaten di Karesidenan Pati.

Tabel 1. 1 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota di Eks Karesidenan Pati

Kabupaten/ Kota	Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota		
	2021	2022	2023
Kabupaten Grobogan	2.362.118.429.670	2.588.637.777.477	2.669.565.660.846
Kabupaten Blora	2.120.587.459.011	2.176.850.305.646	2.418.610.473.320
Kabupaten Rembang	1.773.719.091.126	1.841.484.139.353	1.895.224.155.844
Kabupaten Pati	2.633.641.110.328	2.705.053.757.861	2.758.661.071.421
Kabupaten Kudus	1.956.707.120.620	2.078.759.801.863	2.276.162.193.662
Kabupaten Jepara	2.105.600.556.285	2.326.937.014.364	2.343.131.558.423

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi retribusi Kabupaten Rembang merupakan yang terendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan retribusi daerah. Hal ini menarik untuk dikaji, mengingat sejak tahun 2018, Kabupaten Rembang

telah mengeluarkan inovasi e-retribusi dalam pelayanan transaksi retribusi. Namun, meskipun inovasi tersebut telah diterapkan, penerimaan retribusi daerah masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (Herawati, N. R, 2023).

Pemerintah Kabupaten Rembang meluncurkan e-retribusi sejak tahun 2018 sebuah terobosan baru berupa penyelenggaraan sistem digital untuk pemungutan retribusi yang semula manual. Inovasi ini dirancang untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pasar, sekaligus mengoptimalkan pendapatan dari sektor pasar rakyat di beberapa wilayah pasar Kabupaten Rembang (Redaksi, 2024). Implementasi e-retribusi menjadi indikator bahwa retribusi pasar memiliki potensi menyumbang PAD. Melalui peningkatan kinerja retribusi pelayanan pasar, kontribusinya terhadap keuangan daerah dapat lebih maksimal, yang pada akhirnya berdampak langsung pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang.

Namun Implementasi e-retribusi tidak berjalan dengan baik, meskipun terdapat inovasi dalam upaya penyelenggaraan digitalisasi, solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pasar tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan retribusi. Berikut rincian pendapatan retribusi Kabupaten Rembang secara keseluruhan dari tahun 2020-2023.

Tabel 1. 2 Pendapatan Retribusi Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023

Pendapatan Kabupaten Rembang dari Sektor Retribusi			
Tahun	Anggaran	Angka	%
2020	14.721.396.775	16 368 148,36	111,2
2021	20.190.702.247	16 918 657,73	83,8
2022	32.224.500.000	19 439 698,49	60,3
2023	33.470.500.000	19 522 049,43	58,3

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 Pendapatan Retribusi Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023, pendapatan retribusi di Kabupaten Rembang menunjukkan gambaran yang fluktuatif, namun secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase pendapatan terhadap anggaran mencapai 111,2%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 83,8%, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2022 sebesar 60,3%, dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 58,3%. Penurunan ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan retribusi semakin jauh dari target anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Tabel 1. 3 Jumlah Penerimaan E-Retribusi DINDAGKOP UKM Kabupaten Rembang

Tahun	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pelayanan Persampahan (Kebersihan)	Jumlah
2018	429.665.280	138.750.000	568.415.280
2019	418.347.660	131.145.000	549.492.600
2020	331.156.200	103.110.000	434.266.200
2021	556.575.225	118.095.000	674.670.225
2022	527.552.790	104.205.000	631.757.790
2023	430.207.000	100.150.000	440.222.000
Jumlah Keseluruhan	2.693.504.155	695.455.0003	3.388.959.155

Sumber: Laporan Penerimaan E-Retribusi Pasar Kabupaten Rembang

Data dalam tabel menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar melalui sistem e-Retribusi cenderung fluktuatif dan lebih sering mengalami penurunan.

1. Pada tahun 2018, retribusi dari pelayanan pasar dan pengelolaan sampah mencatatkan peningkatan yang signifikan, bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Capaian ini seharusnya menjadi acuan agar kinerja retribusi tetap konsisten dan berada di atas target.
2. Di tahun 2019, meskipun realisasi retribusi kembali melampaui target, nominal pendapatan justru turun dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya penurunan efektivitas meski capaian target tetap terlampaui.
3. Tahun 2020 memperlihatkan tren penurunan yang lebih tajam. Walaupun target tetap tercapai, jumlah pendapatan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2018 dan 2019.

4. Baru pada tahun 2021, mulai terlihat perbaikan dengan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan dibandingkan tiga tahun sebelumnya.
5. Namun, di tahun 2022, meskipun target kembali terlampaui, angka pendapatan kembali turun.
6. Situasi memburuk di tahun 2023, ketika pendapatan dari sistem e-Retribusi pasar justru tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi petugas pemungut retribusi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pemungutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Herawati, N. R. (2023) mengungkap bahwa dari sisi efisiensi, implementasi program e-Retribusi pasar di Kabupaten Rembang masih belum optimal. Salah satu masalah utama terletak pada proses pengisian saldo kartu e-Retribusi, yang dinilai tidak praktis karena memerlukan waktu dan biaya tambahan. Kendala ini turut mendorong meningkatnya tunggakan retribusi pasar dari tahun ke tahun. Penelitian tersebut merekomendasikan agar sistem e-Retribusi ditingkatkan melalui penambahan fitur seperti pembayaran harian, kanal pengaduan untuk pedagang, dan fitur-fitur lain yang dapat mendukung kemudahan dan kenyamanan pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kualitas pelayanan serta mendorong kepatuhan pembayaran retribusi secara lebih berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, merespons tantangan pengelolaan pasar dengan merancang dan menetapkan program Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang). Program ini dirancang untuk mendukung implementasi konsep *smart city* dan selaras dengan visi misi daerah. SIPP Bang dilengkapi dengan berbagai fitur seperti penyediaan informasi profil pasar, pembaruan harga kebutuhan pokok secara berkala, serta layanan daring untuk pengurusan Kartu Tanda Pedagang (Katadag).

Kepala Dinas, Heri Martono, menyatakan optimisme terhadap keberhasilan program ini, bahkan menyebut SIPP Bang sebagai inisiatif pionir di Jawa Tengah yang akan memperkuat posisi Kabupaten Rembang dalam inovasi layanan publik berbasis teknologi. (24/7/2024). Pemerintah Kabupaten Rembang melalui SIPP Bang telah melakukan upaya perbaikan dari sistem sebelumnya menggunakan e-retribusi. Meskipun, SIPP Bang inovatif sayangnya program ini hanya berjalan di Pasar yang sudah berstandar SNI mengingat Rembang baru ada satu pasar yang sudah berstandar SNI yaitu Pasar Sumber.

Lahirnya inovasi SIPP Bang tidak terlepas dari berbagai persoalan yang selama ini menghambat efektivitas pengelolaan retribusi pasar, terutama dalam hal transparansi penerimaan. Sejumlah kendala mendasar yang mendorong perlunya sistem ini antara lain:

1. Pengelolaan potensi retribusi pasar masih belum maksimal. Basis data yang ada belum merepresentasikan potensi riil yang dimiliki setiap pasar.
2. Tidak adanya kontrol yang memadai terhadap masa berlaku penggunaan lahan oleh pedagang, sehingga banyak pedagang tidak memperpanjang masa sewanya.
3. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, waktu, maupun material seperti karcis dinilai masih belum efisien dan jauh dari optimal.
4. Praktik pembayaran tunai menimbulkan risiko kebocoran pendapatan dan sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan pengelolaan yang menuntut transparansi serta efisiensi.
5. Rendahnya standar pelayanan retribusi pasar akibat belum adanya kepastian waktu pelayanan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan pasar.

Pengelolaan pasar oleh Dindagkop UKM Kabupaten Rembang dalam pengelolaan pasar dalam ini pelaksanaan tugas tersebut belum terlaksana dengan maksimal dalam mengelola retribusi pasar. Rata-rata pelayanan pasar masih menggunakan e-retribusi dan penarikan secara manual. SIPP Bang berjalan sejak awal 2024 target utama pelaksanaan awal ditargetkan di tiga pasar yaitu Pasar Sumber yang ber SNI, kemudian pasar kelas tiga yaitu Pasar Tegaldowo dan Pasar Jolotundo.

Sistem SIPP Bang diharapkan dapat berjalan dengan baik, terutama dalam mempermudah proses penarikan retribusi pasar yang sebelumnya dilakukan secara manual di beberapa pasar harian yang difokuskan dalam implementasi pelaksanaan tersebut. Sistem manual tersebut sering kali menyebabkan penumpukan kas di tangan petugas penagih retribusi serta meningkatkan risiko kebocoran kas. Karena program ini masih tergolong baru, diperlukan waktu untuk melakukan transisi dari sistem lama ke sistem yang baru agar implementasinya dapat berjalan lebih optimal.

Sistem informasi pelayanan pasar di Kabupaten Rembang selama ini berlangsung dinilai kurang maksimal dari segi pelayanan. Masih banyak pasar di Kabupaten Rembang yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang penggunaan sistem berbasis digital, seperti akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang diperlukan. Akibatnya, proses pembayaran retribusi melalui e-Retribusi sering mengalami kendala teknis yang berujung pada keterlambatan pencatatan transaksi dan menurunnya kepercayaan pedagang terhadap sistem ini.

Salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah proses perpanjangan Kartu Tanda Dagang (Katadag) yang lambat dan kurang efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan penyederhanaan alur yang terintegrasi serta pengembangan sistem informasi pasar yang mendukung pelayanan. Saat ini, layanan pasar masih belum optimal karena keterbatasan sarana, kurangnya inovasi program, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Dengan adanya kebijakan berbasis teknologi diharapkan dapat lebih menunjukkan keterbukaan informasi, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Implementasi program e-retribusi di Kabupaten Rembang berjalan kurang baik terutama dalam pengawasan yang dilakukan oleh petugas terhadap pedagang yang menunggak belum dilakukan secara tegas.

Meskipun terdapat standar operasional prosedur (SOP) namun, petugas yang ditugaskan untuk menagih belum melaksanakan sesuai prosedur sepenuhnya. Sanksi yang diterapkan saat ini terbatas pada pemberian surat teguran dan denda administratif sebesar 2% dari pokok retribusi yang belum dibayar. Namun, bentuk sanksi semacam ini dinilai belum mampu menimbulkan efek jera yang kuat bagi para pedagang. Alhasil, banyak di antara mereka cenderung mengabaikan kewajiban membayar retribusi. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya angka tunggakan retribusi dari tahun ke tahun (Pentanurbowo, S., & Uyun, J. S., 2024).

Tabel 1. 4 Laporan Tunggakan E-Retribusi Pasar Rembang Tahun 2021-2023

<u>Tahun</u>	<u>Penunggakan E-Retribusi</u>
2021	85.368.000
2022	128.176.500
2023	204.002.250
<u>Jumlah</u>	417.546.750

Sumber: Dinas Perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah kab. Rembang (2024)

Mengacu pada data dalam Tabel 1.4, jumlah tunggakan pembayaran retribusi menunjukkan tren kenaikan yang cukup tajam. Pada tahun 2022, total tunggakan tercatat sebesar Rp128.176.500. Namun, hanya dalam kurun waktu satu tahun, angka tersebut melonjak drastis menjadi Rp204.002.250 pada tahun

2023. Kenaikan signifikan ini mencerminkan masih lemahnya kepatuhan pembayaran retribusi serta perlunya pembenahan sistem pengelolaan dan penagihan retribusi secara lebih tegas dan terstruktur. Tunggakan retribusi terus melonjak di tahun 202, tunggakan ini diketahui telah mencapai Rp 1 miliar dan sebagian pedagang bahkan menunggak hingga bertahun-tahun. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Rembang tengah menggencarkan penagihan retribusi yang menunggak (Vachri.Rinaldy L, 2025).

Penagihan dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk pendekatan persuasif kepada pedagang, penyampaian surat peringatan, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan tunggakan tersebut. Dindagkop UKM Rembang juga mempertimbangkan penerapan sanksi administratif bagi pedagang yang terus menunggak, seperti pembatasan akses fasilitas pasar atau denda keterlambatan pembayaran. Selain itu, pemerintah daerah berencana untuk meningkatkan efektivitas sistem e-Retribusi dengan memperbaiki infrastruktur teknologi serta memberikan edukasi kepada pedagang mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar retribusi tepat waktu.

Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dindagkop UKM Rembang, Heri Martono, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat penagihan secara masif kepada para pedagang yang memiliki tunggakan. Penerapan surat penagihan dinilai memberikan hasil yang cukup efektif.

Menurut keterangan Heri, respons dari para pedagang mulai menunjukkan perubahan positif.

Sebagian besar mulai menunjukkan itikad baik untuk melunasi tunggakan mereka ada yang langsung membayar lunas, sementara yang lain memilih mencicil sesuai dengan kemampuan masing-masing. “Ada yang langsung melunasi, ada juga yang mencicil meski sedikit demi sedikit. Kami tidak memaksakan, yang penting ada itikad baik dari pedagang untuk melunasi,” jelas Heri. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif masih cukup ampuh dalam mendorong kepatuhan pembayaran retribusi. Meski pedagang hanya mampu membayar Rp 10 ribu atau Rp 20 ribu, pihaknya tetap menghargai adanya progres dalam pelunasan (Vachri.Rinaldy L, 2025).

Pembayaran iuran menggunakan kartu e-retribusi sering mengalami kendala, terutama saat proses *tapping* untuk pengisian saldo yang seharusnya dilakukan pada awal bulan. Di sisi lain, proses pembuatan Kartu Katadag serta perpanjangan kartu mengharuskan para pedagang maupun untuk mengurus berbagai keperluan administratif secara langsung di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat jarak antara pasar dan kantor dinas tersebut cukup jauh, yakni memerlukan waktu tempuh antara 30 menit hingga lebih dari satu jam. Kondisi ini tentu tidak hanya menyita waktu, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas aktivitas ekonomi harian pedagang.

Pengisian saldo kartu e-retribusi sering mengalami keterlambatan dan pembayaran retribusi, yang pada akhirnya menyebabkan pembayaran tertunda hingga bulan berikutnya. Akibatnya, pedagang dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah yang harus dibayarkan. Melihat kondisi di lapangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang memberikan toleransi kepada pedagang dengan alasan kemanusiaan serta memberikan keringanan dalam bentuk skema pembayaran dicicil.

Di sisi lain, para pedagang maupun pengelola pasar dihadapkan pada kendala geografis yang cukup signifikan, di mana mereka harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk keperluan top up saldo, pembuatan Kartu Katadag, ataupun pengurusan administrasi lainnya. Jarak antara pasar dengan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang maupun Bank Jateng tidaklah sepele, bahkan dapat memakan waktu tempuh antara 30 menit hingga lebih dari satu jam. Realitas ini tidak hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga berpotensi menghambat efisiensi layanan serta produktivitas pelaku usaha di pasar, yang idealnya membutuhkan sistem layanan yang lebih terjangkau secara waktu dan lokasi.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang menginformasikan bahwa pelaksanaan Sistem SIPP Bang dijalankan diawal 2024, tepatnya pada bulan Januari. Lokasi pelaksanaan pertama akan dilakukan di Pasar Sumber, yang telah memenuhi standar SNI,

sebagai pasar percontohan. Pasar-pasar lainnya akan mengikuti setelah sistem berhasil diterapkan dan berjalan dengan baik di Pasar sebelumnya.

Sistem ini harus mampu mempermudah proses perpanjangan Kartu Tanda Dagang (Katadag), mempercepat pembayaran retribusi, serta mengurangi potensi penyelewengan dan ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi. Dengan penerapan sistem digital yang modern, pedagang dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, melakukan pembayaran secara fleksibel, serta mendapatkan kepastian dalam proses administratif, sehingga kepercayaan mereka terhadap sistem retribusi pasar semakin meningkat.

Pengelola pasar juga dapat memantau data retribusi secara real-time, memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis data. pelaksanaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung tata kelola pasar yang lebih baik, serta berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu segera melakukan perbaikan dan optimalisasi terhadap sistem SIPP Bang agar dapat diimplementasikan secara lebih luas di berbagai pasar lainnya.

SIPP Bang diharapkan dapat menekan permasalahan yang terjadi di Pasar Kabupaten Rembang salah satu diantaranya meningkatkan Pendapatan Retribusi yang selama ini tidak terserap secara maksimal serta pendapatan Retribusi yang sudah terbayarkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pasar (SIPP Bang) yang di dalamnya terdapat sistem e- Retribusi Pasar secara

otomatis langsung masuk kedalam KAS Daerah sehingga tidak melalui proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu lama.

Penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Program SIPP Bang (Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang) di Kabupaten Rembang" berfokus pada pelayanan pasar berbasis digitalisasi dan manajemen pasar secara menyeluruh. Penelitian ini mencakup aspek yang lebih luas dibandingkan sekadar sistem retribusi, termasuk transparansi, efisiensi administrasi, serta optimalisasi pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Rembang.

Jika sistem ini terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan optimalisasi penerimaan retribusi, maka hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan perbaikan lebih lanjut. Sebaliknya, jika ditemukan berbagai kelemahan yang sulit diatasi, maka penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi alternatif yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi pasar setempat. Dengan pendekatan berbasis data dan lapangan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan yang objektif dan berorientasi pada peningkatan pengelolaan retribusi pasar daerah.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program kebijakan e-retribusi yang dijalankan sejak tahun 2018 hingga saat ini belum optimal dalam implementasinya, sehingga terjadi penurunan terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus menurun setiap tahunnya.
2. Keterbatasan inovasi pada fitur sistem e-retribusi sebelumnya menimbulkan berbagai kendala dalam proses pembayaran retribusi dan pengurusan administrasi, baik bagi pedagang, pengelola pasar, maupun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan dan kontrol pasar.
3. Cakupan penerapan SIPP Bang masih terbatas, hanya diberlakukan di pasar yang sudah berstandar SNI.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi program SIPP Bang di Kabupaten Rembang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program SIPP Bang di Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Mendeskripsikan implementasi Program SIPP Bang di Kabupaten Rembang.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Program SIPP Bang di Kabupaten Rembang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbagan wawasan bagi perkembangan ilmu administrasi public, khususnya untuk memperkaya pengetahuan mengenai pelaksanaan program e retribusi pasar dan pelaksanaan e-retribusi yang baik.
2. Dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan evaluasi program kebijakan, khususnya evaluasi retribusi di Kabupaten Rembang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, universitas, pemerintah Kabupaten Rembang, dan masyarakat.

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan tambahan mengenai evaluasi program kebijakan, serta memberikan pengalaman langsung dalam meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah dan analitis.
2. Bagi Universitas, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi tambahan dalam penelitian ilmiah, serta menjadi bahan

rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan topik yang sama.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Rembang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif serta menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi penerimaan retribusi yang efektif di masa mendatang.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terutama para pedagang pasar mengenai evaluasi Program SIPP Bang terhadap penerimaan retribusi, sehingga masyarakat dapat lebih memahami manfaat serta mekanisme program tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
1.	Afif Fadhilah, Nunik Retno Herawati (2024)	Evaluasi Program E-Retribusi Pasar Di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 Tinjauan dari Pedagang Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang).	Mengevaluasi program E-Retribusi Pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang yang ditinjau dari pedagang Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang terhadap diberlakukannya Program E-Retribusi Pasar yang diukur dengan 6 kategori	Pelaksanaan program e-retribusi pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang belum optimal berdasarkan enam kategori evaluasi. Indikator efektivitas (62,12%) dan responsivitas (58,45%) menunjukkan hasil cukup baik karena telah diterima oleh pengelola pasar dan pedagang. Pemerataan juga cukup baik (58,05%), meskipun

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
			yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.	pedagang merasa terbebani dengan sistem pembayaran bulanan. Ketepatan (57,05%) dan kecukupan (54,38%) dinilai cukup karena program ini sesuai dengan rencana awal serta meningkatkan akuntabilitas dan kepastian tarif retribusi. Namun, efisiensi masih rendah (45,49%) akibat sistem pengisian ulang saldo yang tidak praktis dan membutuhkan biaya tambahan. Permasalahan ini menyebabkan peningkatan tunggakan retribusi pasar setiap tahun.
2.	Hendra Felani, I Putu Adhi Suryanata (2023)	Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Pencegahan Kebocoran Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tabanan.	Menjelaskan proses implementasi kebijakan e-retribusi pasar tradisional untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah di Kabupaten Tabanan.	Implementasi kebijakan e-retribusi pada pasar tradisional di Kabupaten Tabanan masih kurang optimal akibat buruknya komunikasi antara petugas pemungut, Dinas Perindag, dan pedagang, yang menyebabkan miskomunikasi dan koordinasi yang lemah. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala, di mana petugas masih kurang terampil dalam menggunakan alat e-retribusi, ditambah jumlah perangkat yang tidak mencukupi sehingga menghambat kinerja mereka.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
				Meskipun petugas telah menjalankan tugas sesuai aturan, sistem birokrasi yang kurang efektif memperlambat pengambilan kebijakan. Akibatnya, implementasi e-retribusi belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan.
3.	S Pentanurbowo, Jazila Syifaul Uyun (2024)	Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kota Rembang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023.	Menganalisis pengelolaan retribusi pasar di Kota Rembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang tahun 2023. Studi ini menganalisis sistem pengelolaan retribusi pasar telah berkontribusi terhadap peningkatan PAD, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target retribusi, termasuk kendala yang dihadapi dalam sistem pembayaran dan pengelolaan retribusi	Pengelolaan retribusi pasar di Kota Rembang tahun 2023 belum optimal, ditandai dengan pencapaian retribusi yang hanya mencapai 68% dari target Rp. 1.863.066.201. Kendala utama meliputi ketidaksesuaian tugas pegawai pasar, minimnya pemahaman pedagang dalam membayar retribusi, serta masalah dalam sistem pembayaran elektronik, yang menyebabkan penunggakan retribusi dari Rp. 128.176.500 pada 2022 menjadi Rp. 204.002.250 pada 2023. Hal ini berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengatasinya, dilakukan upaya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
				seperti sosialisasi kepada pedagang, peningkatan fasilitas pasar, optimalisasi sistem pembayaran elektronik, serta pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai pasar.
4.	Diyah Ayu Febriani, Dra. Sri Wijastuti, MM, Drs. Darsono, M.Si (2023)	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembayaran Retribusi Berbasis Non Tunai E-Retribusi Selama Lima Tahun Berjalan Pada Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Rembang.	Mengevaluasi pelaksanaan program pembayaran retribusi berbasis non-tunai (e-Retribusi) selama lima tahun berjalan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Rembang. Evaluasi ini dilakukan untuk memahami pengaruh CV. AMM IT Solutions dan PT. Bank Jateng terhadap pendapatan e-Retribusi pasar serta bagaimana keduanya memengaruhi efektivitas sistem pembayaran non-tunai.	Evaluasi program e-Retribusi selama lima tahun di Kabupaten Rembang menunjukkan beberapa kendala utama, seperti masalah jaringan yang menyebabkan ketidaksinkronan antara sistem CV. AMM IT Solutions dan Bank Jateng, sehingga sering terjadi tunggakan retribusi dan ketidakpuasan pedagang. Bank Jateng tidak dapat memisahkan jenis pendapatan, seperti sampah, kios, los, dan denda umum, sehingga diperlukan pihak ketiga, yaitu CV. AMM. Selain itu, fasilitas pembayaran kurang memadai karena pedagang harus mengisi saldo di Bank Jateng Cabang Rembang, yang dinilai kurang efektif dan efisien. Miskomunikasi antara laporan Excel CV. AMM dan sistem CMS Bank Jateng juga menyebabkan data yang tidak sinkron, memaksa

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
				pedagang untuk melakukan tapping ulang dan berpotensi meningkatkan tunggakan. Oleh karena itu, perbaikan jaringan, peningkatan fasilitas, dan sinkronisasi sistem menjadi hal yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas e-Retribusi.
5.	Nurul Dhea Narasmita, Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. (2019)	Efektivitas Sistem Informasi Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasar (Siladamas) di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban untuk Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar	Mendesripsikan efektivitas Sistem Informasi Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasar (SILADAMAS) di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban untuk peningkatan pendapatan retribusi pasar.	Sistem Informasi Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasar (Siladamas) di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pasar serta pendapatan retribusi. Meskipun masih terdapat kendala, penerapan inovasi berbasis Teknologi Informasi (TI) ini telah membantu mengatasi permasalahan manajemen pasar, memastikan kepastian data dan perizinan, menekan kebocoran pendapatan, serta meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan. Keberhasilan Siladamas menunjukkan pentingnya transformasi digital

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
				dalam tata kelola pasar daerah guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6.	Muhammad Syaeful Fajar, Ardian Prima Atmaja, Hendrik Kusbandono (2021)	Sistem Manajemen Pembayaran Retribusi Pasar di Kabupaten Madiun Menggunakan <i>Smart Card</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi manajemen pembayaran retribusi pasar yang transparan, efektif, dan efisien dalam pengelolaan dana retribusi. Dengan memanfaatkan teknologi Smart Card berbasis web dan Android, sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pembayaran dan pendataan retribusi pasar, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendukung penerapan pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada prinsip Good Governance.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran retribusi pasar menggunakan Smart Card lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Sistem ini mempermudah petugas dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pendapatan secara lebih detail serta memungkinkan monitoring berkala. Dengan penerapan teknologi ini, pengelolaan retribusi pasar menjadi lebih transparan dan efisien, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan pendapatan daerah.
7.	Ikhwani Ratna, Hamidah Silvi (2023)	Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar	Menganalisis efektivitas sistem pemungutan retribusi pasar di Pasar Rumbio, Kabupaten Kampar, dalam kaitannya dengan kontribusi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan retribusi di Pasar Rumbio masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari efektivitas pemungutan retribusi

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
			terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.	yang bervariasi setiap tahun, dengan beberapa tahun mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Faktor utama yang menjadi kendala adalah rendahnya pengawasan dari petugas, kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pengawasan, penyesuaian kebijakan, serta perbaikan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pasar.
8.	Yayat Sudrajat, Indra Kristian (2022)	Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang	menganalisis efektivitas sistem pemungutan retribusi di Pasar Rumbio, Kabupaten Kampar, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, seperti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pemungutan retribusi di Pasar Rumbio, Kabupaten Kampar, masih belum optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Meskipun pasar berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sistem pemungutan yang diterapkan mengalami berbagai kendala, seperti rendahnya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
			rendahnya pengawasan petugas, kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, serta keterbatasan sarana dan prasarana.	pengawasan petugas, kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Efektivitas pemungutan retribusi bervariasi setiap tahunnya, dengan beberapa periode tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun tertentu, penerimaan retribusi pasar hanya mencapai 46,67% dari target, menunjukkan rendahnya efektivitas dalam pengelolaan retribusi. Selain itu, keterlambatan penyetoran retribusi dari petugas ke bendahara daerah juga menjadi masalah yang perlu diatasi.
9.	Dwi Cahyono, Abu Bakar Akbar (2021)	Sistem Penarikan Retribusi Pasar Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.	Menganalisis potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta prospek penerimaan retribusi di Pasar Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam realisasi pendapatan pasar retribusi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi di Pasar Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, cukup besar, namun realisasi pendapatannya dalam lima tahun terakhir belum mencapai potensi maksimalnya. Analisis prospek retribusi pasar menunjukkan hasil positif dalam lima tahun ke depan, tetapi masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, buruknya pengelolaan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
			yang belum mencapai potensi maksimalnya, serta mengevaluasi efektivitas sistem pemungutan retribusi yang diterapkan.	sampah, serta kondisi bangunan los dan kios yang tidak terawat. Selain itu, banyak pedagang yang membayar retribusi di bawah tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Kurangnya pengawasan dan sanksi tegas bagi pedagang yang tidak membayar retribusi juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pendapatan daerah.
10.	Lilis Tiani, Bambang Irawan (2023)	E-Retribusi Pasar di Pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau Kalimantan Timur	Mendeskripsikan pelaksanaan e-retribusi di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kabupaten Berau, mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta mengidentifikasi kendala dalam penerapan sistem e-retribusi, seperti kurangnya sosialisasi, koordinasi yang lemah, ketiadaan SOP, dan rendahnya tingkat kesadaran pedagang dalam menggunakan sistem pembayaran non-tunai.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-retribusi pasar di Kabupaten Berau belum efektif dalam meningkatkan PAD akibat sosialisasi yang kurang maksimal, koordinasi yang lemah, serta ketiadaan SOP. Sistem e-retribusi melalui EDC hanya berjalan tiga bulan sebelum digantikan oleh aplikasi dan QRIS pada 2022, namun penggunaannya masih rendah. Kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, baik tunai maupun non-tunai, juga masih rendah, sementara tenaga penarik retribusi menunjukkan kesadaran yang baik., temuan lain penelitian ini adalah dalam

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
				pelaksanaanya e-retribusi tidak dapat mengakomodasi pembayaran tunggakan.
11.	Cheryl R. Cooper, David W. Perkins, Marc Labonte (2019)	<i>U.S. Payment System Policy Issues: Faster Payments and Innovation</i>	Menganalisis dampak inovasi dalam sistem pembayaran terhadap konsumen, bisnis, dan pasar keuangan, serta mengevaluasi peran regulasi dalam menjaga keamanan, perlindungan konsumen, dan privasi data. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan Federal Reserve dalam menciptakan sistem pembayaran real-time serta mengkaji kompetisi antara sektor publik dan swasta dalam menyediakan layanan pembayaran yang lebih cepat, efisien, dan inklusif bagi masyarakat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi dalam sistem pembayaran meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi, tetapi masih menghadapi tantangan regulasi, keamanan siber, dan privasi data. Banyak layanan baru masih bergantung pada infrastruktur lama, sementara aksesibilitas bagi kelompok kurang terlayani tetap menjadi perhatian. Federal Reserve telah mengumumkan rencana untuk menciptakan sistem pembayaran real-time (FedNow) yang berpotensi meningkatkan persaingan dengan sektor swasta, memunculkan perdebatan tentang efektivitas dan dampak dari keterlibatan pemerintah dalam inovasi pembayaran.
12.	Surya Dailiati, Hernimawati, Prihati Prihati, Bunga Chintia Utami (2018)	<i>Cleanliness Policy Implementation: Evaluating Retribution Model to Rise Public Satisfaction</i>	Mengevaluasi implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru dan bagaimana kebijakan tersebut	kebijakan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan PAD dan kepuasan masyarakat. Model evaluasi kebijakan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
			berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kepuasan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kesesuaian kebijakan, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaannya.	yang dikembangkan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas dan responsivitas kebijakan memiliki dampak terbesar terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan revisi kebijakan yang lebih selaras dengan kebiasaan masyarakat, seperti penyesuaian jadwal pengangkutan sampah agar lebih sesuai dengan waktu pembuangan sampah oleh warga
13.	Dhian Kartika S, Nunik Retno Herawati, S.Sos, M.Si (2021)	Implementasi Program E-Retribusi Pasar sebagai Upaya Pemerintah Kota Semarang Mewujudkan Good Governance Tahun 2019	menganalisis implementasi program e-Retribusi Pasar di Kota Semarang sebagai upaya mewujudkan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi pasar. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan pembayaran retribusi tunai yang dianggap kurang efektif dan rawan kebocoran. Selain itu, penelitian ini juga	Penerapan e-Retribusi Pasar di Kota Semarang telah berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah, dengan kenaikan pendapatan retribusi sebesar Rp363.106.760 pada tahun 2017–2018 dan Rp282.652.733 pada tahun 2018–2019. Namun, implementasi program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurang optimalnya transparansi dalam akses informasi bagi pedagang dan belum maksimalnya akuntabilitas pemerintah dalam menangani permasalahan teknis,

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
			ingin mengetahui apakah implementasi e-retribusi sudah sesuai dengan tahapan kebijakan yang baik serta mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.	seperti gangguan sistem pembayaran.
14.	Elvira Intan Pramesti (2023)	Implementasi Kebijakan Program E-Retribusi Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Di Kabupaten Sidoarjo	Menganalisis implementasi program E-Retribusi Pasar di Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dalam sistem pembayaran retribusi. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan metode pembayaran manual yang dinilai kurang transparan dan rentan terhadap penyimpangan. Selain itu, penelitian ini ingin melihat sejauh mana efektivitas penggunaan metode pembayaran digital seperti QRIS dan barcode dalam mempermudah proses transaksi retribusi bagi pedagang dan	Penerapan E-Retribusi di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek sosialisasi dan adaptasi pedagang terhadap sistem pembayaran digital. Pasar Larangan menunjukkan penerimaan yang lebih baik karena pedagang dan petugas sudah mengalami proses penyesuaian, sementara di Pasar Porong masih terjadi kendala dalam pemahaman teknis penggunaan aplikasi pembayaran. Selain itu, sistem pembayaran yang bekerja sama dengan perbankan masih menemui hambatan, seperti keengganan pedagang untuk membuka rekening baru dan biaya administrasi yang dianggap membebani.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
			pemerintah daerah.	
15.	Veronica Sri Astuti, Husni Mubarak, Arifin	Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Gotong Royong Dalam Meningkatkan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Probolinggo	Menganalisis implementasi kebijakan E-Retribusi Pasar Gotong Royong dalam meningkatkan pendapatan keuangan dan aset daerah di Kota Probolinggo. Dengan adanya sistem pembayaran berbasis digital ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam proses penarikan retribusi pasar. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberlanjutan program ini, terutama dalam kaitannya dengan kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.	Implementasi e-retribusi di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo belum berjalan optimal. Meskipun sistem ini telah berhasil diterapkan dan meningkatkan transparansi dalam penarikan retribusi, masih ada kendala dalam kesadaran pedagang untuk membayar retribusi secara rutin, yang menjadi faktor utama dalam keberlanjutan program. Selain itu, sosialisasi yang kurang menyeluruh menyebabkan banyak pedagang masih kebingungan dalam menggunakan sistem pembayaran digital. Namun, dari segi teknis dan sumber daya manusia, program ini sudah berjalan cukup baik, terutama karena adanya kerja sama dengan Bank Jatim dalam mendukung transaksi non-tunai.
16.	Isam Saleh, Malik Abu Afifa, Abdallah Alkhawaja &	<i>Electronic Payment Systems' Characteristics And Accountinginformation Systems Effectiveness: The Moderating</i>	Menyelidiki dampak karakteristik sistem pembayaran elektronik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan, keandalan, dan jaminan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
	Tamim Hannon (2024)	<i>Impact Ofperceived Customers' Uncertainty</i>	(keamanan, keandalan, dan jaminan) terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi (AIS) di institusi pemerintah Yordania. Penelitian ini juga meneliti peran moderasi ketidakpastian pelanggan dalam hubungan tersebut.	AIS. Namun, ketidakpastian pelanggan tidak memoderasi hubungan antara keamanan dan efektivitas AIS. Penelitian ini memberikan kontribusi pada peningkatan efektivitas data keuangan yang berguna bagi pengambil keputusan, pembuat kebijakan, dan pengembangan sistem AIS di lingkungan pemerintahan.
17.	Daniela Ivova Taneva, Vasilka Todorova Gyurova-Kancheva, Angelina Georgieva Kirkova-Bogdanova Diana Angelova Paskaleva, and Yovka Tinkova Zlatanova	<i>Electronic Nursing Records: Importance for Nursing and Benefits of Implementation in Health Information Systems—A Scoping Review</i>	Memahami pentingnya pencatatan keperawatan elektronik (<i>Electronic Nursing Records</i> atau ENR) dan manfaat penerapannya dalam sistem informasi kesehatan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai negara telah mulai mengadopsi atau dalam proses menerapkan sistem ini.	ENR memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perawatan keperawatan, meningkatkan keselamatan pasien, serta memperkuat profesionalisme perawat melalui dokumentasi yang lebih sistematis dan terstandarisasi. Beberapa manfaat utama dari ENR yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup peningkatan efisiensi dalam pencatatan medis, integrasi dengan sistem informasi rumah sakit, pengurangan kesalahan pencatatan, serta memberikan data yang lebih akurat untuk keperluan penelitian dan analisis

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
				statistik. Selain itu, penggunaan ENR juga mendukung pendekatan berbasis bukti dalam praktik keperawatan, memungkinkan perawat untuk bekerja lebih efektif dengan informasi yang lebih mudah diakses dan dikelola.
18.	Kennedy Addo and Pabbi Kwaku Agyepong (2024)	<i>Evaluating The Health Information System Implementation And Utilization In Healthcare Delivery</i>	Mengevaluasi penerapan dan penggunaan sistem informasi kesehatan dalam layanan kesehatan, khususnya di Ghana. Fokus utama penelitian ini adalah sistem <i>Electronic Health Records</i> (EHR) dan <i>District Health Information and Management System</i> (DHIMS-2). Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana sistem ini diterima oleh tenaga kesehatan, manfaat yang diberikan, serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya.	Mayoritas tenaga kesehatan merasa bahwa sistem ini membantu dalam mengurangi beban kerja, mempercepat waktu tunggu pasien, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan data medis. Namun, masih ada beberapa kendala seperti jaringan komputer yang sering bermasalah, pasokan listrik yang tidak stabil, serta kurangnya pelatihan bagi pengguna. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa sikap pengguna dan persepsi mereka terhadap manfaat sistem sangat memengaruhi penerimaan dan keberlanjutan penggunaan sistem informasi kesehatan ini.
19.	Shafiqur Rahman And Aminul Islam	<i>Success Factors in the Implementation of Healthcare Information Systems (HIS) among Developing Countries</i>	Mengidentifikasi faktor keberhasilan dalam penerapan sistem informasi kesehatan (Health	Terdapat 12 faktor utama yang mendukung keberhasilan HIS, yang dikelompokkan ke dalam empat aspek

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
			Information System/HIS) di negara-negara berkembang, dengan fokus pada tantangan dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode <i>Systematic Literature Review (SLR)</i> , di mana lebih dari 4000 studi ditinjau untuk menemukan faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan HIS.	utama: alokasi sumber daya, faktor budaya dan politik, pendidikan dan pelatihan, serta kualitas sistem. Ketersediaan sumber daya, termasuk listrik dan konektivitas internet, menjadi faktor kunci dalam penerapan HIS. Selain itu, dukungan pemerintah, pelatihan bagi tenaga medis, serta kualitas sistem yang mudah digunakan juga berperan besar dalam meningkatkan adopsi HIS.

Tabel di atas merupakan hasil pemetaan jurnal-jurnal terdahulu oleh peneliti, dimana keseluruhan jurnal memiliki pembahasan yang saling terkait mengenai implementasi kebijakan e-retribusi disejumlah Kabupaten/Kota guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah masing-masing. Perbedaan besar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang terlebih dahulu dilaksanakan tersebut adalah terletak pada fokus dan lokusnya kemudian teori yang digunakan.

Penelitian terdahulu umumnya memiliki locus yang berbeda pada implementasi e-Retribusi di berbagai daerah, seperti Kabupaten Rembang, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Semarang, Kabupaten

Berau, dan Kota Probolinggo. Adapun penelitian terdahulu di negara lain seperti Yordania, Bangladesh, dan Ghana. Misalnya, penelitian Afif Fadhilah dan Nunik Retno Herawati (2024) berlokasi di Pasar Kota Rembang dan membahas efektivitas e-Retribusi dari perspektif pedagang. Sementara itu, penelitian Hendra Felani dan I Putu Adhi Suryanata (2023) meneliti e-Retribusi di Kabupaten Tabanan dengan fokus pada pencegahan kebocoran PAD. Sistem pemungutan e-Retribusi yang terdapat dalam penelitian terdahulu sebagian besar masih menggunakan sistem e-Retribusi yang manual.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian “Pelaksanaan Program SIPP Bang (Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang) di Kabupaten Rembang” memiliki locus yang lebih luas, yakni sistem pengelolaan pasar secara menyeluruh di Kabupaten Rembang. Fokusnya tidak hanya pada aspek pembayaran retribusi, tetapi juga pada transparansi administrasi, pendataan pedagang, serta integrasi sistem informasi dalam pengelolaan pasar.

Penelitian sebelumnya sebagian besar hanya menyoroti efektivitas dan kendala dalam implementasi e-Retribusi, baik dari sisi teknis, sosialisasi, maupun dampaknya terhadap PAD. Misalnya, penelitian S. Pentanurbowo dan Jazila Syifaul Uyun (2024) menganalisis pengelolaan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap PAD, sementara penelitian Nurul Dhea Narasmita (2019) meneliti efektivitas sistem layanan digital seperti SILADAMAS dalam peningkatan retribusi. Sebaliknya, penelitian SIPP

Bang di Kabupaten Rembang memiliki cakupan yang lebih luas. Fokus penelitian ini tidak hanya pada sistem pembayaran retribusi digital, tetapi juga pada integrasi sistem informasi dalam pengelolaan pasar, mencakup aspek administrasi, pendataan pedagang, dan pengawasan pasar secara digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai peran digitalisasi dalam tata kelola pasar tradisional.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh negara lain seperti Bangladesh dengan Judul *Success Factors in the Implementation of Healthcare Information Systems (HIS) among Developing Countries* penelitian ini berfokus pada faktor keberhasilan dalam penerapan sistem informasi kesehatan (*Health Information System/HIS*) penelitian ini mengidentifikasi Negara-negara berkembang dapat menjembatani kesenjangan teknologi perawatan kesehatan dan meningkatkan kualitas perawatan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kesadaran, dan mendorong kolaborasi.

Kaitan penelitian tersebut dengan penelitian Pelaksanaan Program SIPP Bang (Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang) di Kabupaten Rembang adalah adanya kesamaan dalam upaya pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Jika dalam penelitian di Bangladesh fokusnya pada penerapan sistem informasi kesehatan untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kualitas perawatan, maka dalam penelitian Pelaksanaan Program SIPP Bang di

Kabupaten Rembang, sistem informasi digunakan untuk mendukung pengelolaan pasar secara lebih terstruktur, transparan, dan efisien. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi yang tepat dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas layanan, baik di sektor kesehatan maupun pengelolaan pasar.

Penelitian terdahulu banyak menggunakan teori Implementasi Kebijakan dan *Good Governance*, seperti yang diterapkan dalam penelitian Dhian Kartika S (2021) di Kota Semarang yang menganalisis bagaimana e-Retribusi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pasar. Sementara itu, penelitian Veronica Sri Astuti (2023) di Kota Probolinggo mengacu pada teori Efektivitas Implementasi Kebijakan untuk menilai kendala dalam penerapan e-Retribusi.

Sebaliknya, penelitian SIPP Bang peneliti menggunakan teori lima tepat dalam keefektifan implementasi kebijakan dari Riant Nugroho (2011:618) dan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975) dengan menggunakan enam indikator. untuk memahami bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan pasar. Perbedaan utama antara penelitian SIPP Bang dengan penelitian e-Retribusi yang lebih banyak menyoroti aspek pembayaran retribusi dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah adalah karena sistem SIPP Bang merupakan inovasi dari e-retribusi yang memiliki fitur unggulan dan tidak hanya sekedar alat pembayaran retribusi saja.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua konsep dasar: *administrasi* dan *publik*. Administrasi secara umum dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, administrasi juga mencakup pelaksanaan kebijakan sebagai upaya nyata untuk mewujudkan keputusan yang telah dibuat. Sementara itu, istilah *publik* mengarah pada kelompok yang lebih luas seperti masyarakat, warga negara, konsumen layanan pemerintah, serta kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam negara.

Dengan demikian, administrasi publik dapat dimaknai sebagai proses penyelenggaraan kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencerminkan proses pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dimulai dari publik, dijalankan oleh aparat publik, dan berakhir untuk kepentingan publik itu sendiri. Dalam skala yang lebih besar, administrasi publik memegang peranan penting dalam memastikan arah pembangunan nasional berjalan sesuai tujuan, melalui tata kelola yang efisien, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Dengan kata lain, administrasi publik tidak hanya berfokus pada efisiensi dalam pelaksanaan proses pembangunan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunan itu sendiri. Hal ini terutama tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang

efektif sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik telah mengalami proses perkembangan yang panjang dan cukup kompleks. Salah satu cara memahami perjalanan tersebut adalah melalui perubahan paradigma yang terjadi seiring waktu. Nicholas Henry (2004) menguraikan bahwa terdapat lima paradigma utama dalam evolusi administrasi publik.

Paradigma pertama dikenal sebagai dikotomi antara politik dan administrasi, yang berlangsung antara tahun 1900 hingga 1926. Fase ini dipengaruhi oleh pemikiran Frank J. Goodnow dalam bukunya *Politics and Administration* (1900), serta Leonard D. White melalui karyanya pada tahun 1926. Goodnow menyampaikan bahwa fungsi negara dapat dibagi menjadi dua dimensi: politik dan administrasi. Politik berkaitan dengan penetapan kebijakan atau bentuk dari kehendak negara, sementara administrasi berfokus pada implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Meskipun begitu, ide dasar tentang pemisahan ini sebenarnya telah muncul lebih awal dalam tulisan Woodrow Wilson, yang menjadi salah satu peletak dasar pemikiran administrasi publik modern

Pemikiran Woodrow Wilson yang dituangkan dalam tulisannya *The Study of Administration* pada tahun 1887 menjadi salah satu fondasi awal dalam perkembangan administrasi publik. Dalam pandangannya, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara konsisten dan profesional,

maka administrasi harus dipisahkan dari ranah politik. Wilson menilai bahwa administrasi merupakan bidang yang bersifat teknis dan operasional lebih dekat dengan praktik bisnis daripada urusan politik. Oleh karena itu, menurutnya, persoalan-persoalan administratif seharusnya tidak dicampuradukkan dengan pertimbangan-pertimbangan politik. Dengan memisahkan administrasi dari politik, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara netral, objektif, dan bebas dari nilai-nilai politik yang bersifat subjektif.

Paradigma pertama ini menekankan pada *lokus*, atau posisi di mana administrasi publik seharusnya ditempatkan. Goodnow dan para pendukung pandangan ini meyakini bahwa administrasi publik seharusnya beroperasi dalam kerangka birokrasi pemerintah. Namun, pada tahap ini belum ada perhatian serius terhadap fokus atau substansi apa yang seharusnya menjadi inti dari administrasi publik itu sendiri. Selanjutnya, muncul Paradigma Kedua, yaitu Prinsip-prinsip Administrasi, yang berkembang antara tahun 1927 hingga 1937.

Paradigma kedua dalam perkembangan administrasi publik dimulai dengan terbitnya buku penting karya Willoughby berjudul *Principles of Public Administration* pada tahun 1927. Dalam buku ini, Willoughby menekankan bahwa administrasi publik memiliki seperangkat prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diidentifikasi dan dipelajari. Ia percaya bahwa apabila para administrator memahami dan mampu menerapkan prinsip-

prinsip tersebut secara sistematis, maka mereka akan menjadi profesional yang kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Pada masa ini, administrasi publik mulai dipandang sebagai sebuah ilmu yang dapat diajarkan secara formal. Penelitian di bidang ini berkembang pesat, dan banyak universitas serta lembaga pendidikan tinggi mulai membuka program studi administrasi publik. Selain itu, dukungan dari lembaga filantropi seperti *The Rockefeller Philanthropies* turut mendorong terbentuknya berbagai asosiasi profesional di sejumlah wilayah. Paradigma ini menandai pergeseran fokus dari sekadar posisi (lokus) administrasi dalam pemerintahan menuju pemahaman bahwa ada prinsip-prinsip universal yang dapat meningkatkan efektivitas kerja administratif.

Periode ini menandai masa keemasan bagi administrasi publik, di mana para teoritis bidang ini mulai mendapatkan pengakuan luas, tidak hanya dari kalangan pemerintahan tetapi juga di sektor industri, terutama selama dekade 1930-an hingga awal 1940-an. Fokus utama dalam Paradigma 2 adalah pada pencarian dan penerapan prinsip-prinsip dasar administrasi sebagai bentuk keahlian inti yang harus dimiliki oleh setiap administrator publik. Dalam tahap ini, isu mengenai *lokus* administrasi publik mulai dianggap tidak relevan, karena prinsip-prinsip administratif dipercaya berlaku universal baik dalam organisasi publik maupun swasta—tanpa terpengaruh oleh konteks budaya atau institusional.

Di antara tokoh sentral yang mengembangkan prinsip-prinsip ini adalah Luther Gulick dan Lyndall Urwick, yang merupakan penasihat kepercayaan Presiden Franklin D. Roosevelt. Mereka memperkenalkan tujuh prinsip administratif yang dikenal luas melalui akronim POSDCoRB: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting*, dan *Budgeting*. Menurut mereka, keberhasilan organisasi tidak lagi bergantung pada pemisahan politik dan administrasi, melainkan pada seberapa efektif prinsip-prinsip tersebut diterapkan.

Di sisi lain, Max Weber turut memberikan sumbangan penting dengan konsep birokrasi ideal, yang menekankan pada unsur-unsur seperti standardisasi dan formalisasi, pembagian kerja, spesialisasi, struktur hierarkis, kompetensi profesional, serta dokumentasi tertulis. Namun dominasi pendekatan prinsip ini mulai digugat ketika Herbert Simon menerbitkan bukunya *Administrative Behavior* pada tahun 1947, yang menjadi pembuka menuju paradigma berikutnya.

Dalam bukunya *Administrative Behavior*, Herbert Simon membongkar asumsi lama tentang bagaimana keputusan diambil dalam organisasi. Ia menyoroti bahwa dalam praktiknya, para pengambil keputusan tidak selalu mencari pilihan terbaik, melainkan cenderung memilih opsi yang *cukup memuaskan*. Konsep ini kemudian dikenal sebagai *satisficing*, dan menjadi dasar bagi gagasan *rasionalitas terbatas (bounded rationality)*. Artinya, individu dalam organisasi tidak bertindak secara rasional secara absolut, melainkan berdasarkan keterbatasan informasi,

waktu, serta kapasitas kognitif yang mereka miliki. Simon juga menekankan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, individu dipengaruhi oleh berbagai premis yang dibentuk oleh nilai-nilai, keyakinan, norma organisasi, dan juga tekanan dari lingkungan eksternal. Oleh karena itu, menurutnya, pemisahan antara politik dan administrasi seperti yang diyakini dalam paradigma sebelumnya adalah ilusi keduanya selalu saling terkait.

Setahun setelah buku Simon terbit, Dwight Waldo meluncurkan *The Administrative State: A Study of Political Theory of American Public Administration* pada tahun 1948, yang memperluas kritik terhadap pemisahan teoretis antara administrasi dan politik dalam praktik pemerintahan Amerika.

Buku *The Administrative State* yang ditulis oleh Dwight Waldo sebenarnya berangkat dari disertasinya di Yale University pada tahun 1942, berjudul *Theoretical Aspect of American Literature of Public Administration*. Dalam karya ini, Waldo secara terang-terangan mengkritik pandangan ortodoks yang mendominasi literatur administrasi publik saat itu. Ia menolak pemisahan tegas antara administrasi dan politik, dan justru menegaskan bahwa administrasi publik tak bisa dilepaskan dari konteks politik.

Menurut Waldo, administrasi publik bukan sekadar proses teknis yang netral, melainkan merupakan ekspresi dari teori politik itu sendiri. Ia

juga berpendapat bahwa bentuk dan praktik administrasi publik sangat dipengaruhi oleh kondisi material dan ideologis yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan dalam konstitusi atau dalam kerangka hukum akan berimplikasi langsung terhadap bagaimana administrasi dijalankan.

Di antara akhir 1930-an hingga 1950, perdebatan utama dalam dunia akademik adalah apakah administrasi publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bebas nilai (*value-free*) atau sarat nilai (*value-laden*). Dalam praktiknya, Waldo menunjukkan bahwa administrasi lebih sering beroperasi dalam wilayah yang penuh dengan nilai dan kepentingan politik. Pandangan serupa juga disampaikan oleh John M. Gaus, yang menyatakan bahwa teori administrasi publik sejatinya tak bisa dipisahkan dari teori politik.

Paradigma 3: Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950–1970)

Sebagai respons terhadap berbagai kritik terhadap pendekatan sebelumnya, administrasi publik pada masa ini kembali merapat ke akar keilmuannya, yakni ilmu politik. Langkah ini mencerminkan semacam “gerakan mundur” bukan dalam arti regresif, melainkan sebagai refleksi atas hubungan yang tak bisa dielakkan antara administrasi dan politik. Dalam periode ini, orientasi kembali diletakkan pada *lokus*, yaitu birokrasi pemerintah, sementara isu tentang *fokus* mulai dikesampingkan.

Masa ini bisa dianggap sebagai fase evaluatif, di mana hubungan antara administrasi publik dan politik dikaji ulang secara mendalam. Namun, dampaknya justru menciptakan semacam kekosongan konseptual.

Tidak ada kerangka kerja intelektual yang kokoh menopang studi administrasi publik saat itu. Bahkan sebagian kalangan menyebut periode ini sebagai fase kemerosotan yang serius bagi bidang ini.

Cerminan dari kemunduran ini dapat dilihat dari minimnya perhatian terhadap administrasi publik dalam lingkup akademik ilmu politik: antara tahun 1960 hingga 1970, hanya sekitar 4% artikel yang dimuat dalam lima jurnal ilmu politik terkemuka yang membahas topik administrasi publik. Ini menunjukkan bagaimana posisi administrasi publik sempat terpinggirkan dari wacana akademik arus utama pada dekade tersebut.

Salah satu momen yang mencerminkan kemunduran posisi administrasi publik terjadi pada tahun 1962, ketika bidang ini tidak lagi diakui sebagai subdisiplin dalam laporan resmi *American Political Science Association*. Ini menjadi penanda bahwa eksistensi administrasi publik di dalam ilmu politik tengah berada pada titik nadir.

Meski begitu, pada dekade 1960-an, muncul upaya untuk membangkitkan kembali legitimasi ilmiah administrasi publik, terutama melalui kerja-kerja *Comparative Administration Group* (CAG). Kelompok ini mencoba membangun fondasi epistemologis yang lebih kuat bagi administrasi publik, dan mendapat dukungan dana dari *Ford Foundation*. Salah satu tokoh sentral dari gerakan ini adalah Fred W. Riggs, yang

kemudian dikenal luas lewat pendekatannya terhadap administrasi publik lintas budaya.

Pendekatan komparatif yang ditawarkan CAG menandai babak baru dalam cara memahami administrasi publik, khususnya melalui perspektif lintas negara dan lintas budaya. Namun, meskipun ambisius secara intelektual, kelompok ini menghadapi tantangan konseptual yang serius. Di satu sisi, administrasi publik di Amerika sangat pragmatis dan berfokus pada penerapan kebijakan; di sisi lain, pendekatan komparatif yang diusung CAG justru lebih menekankan pada pembangunan teori dan pengembangan pengetahuan ilmiah.

Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956–1970)

Paradigma keempat dalam perkembangan administrasi publik berlangsung hampir bersamaan dengan paradigma ketiga. Kekecewaan terhadap posisi subordinat administrasi publik di dalam disiplin ilmu politik mendorong para pemikirnya mencari jalur alternatif untuk memosisikan bidang ini sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Salah satu arah baru yang diambil adalah dengan mendekatkan administrasi publik ke ranah manajemen umum yang kemudian dikenal juga sebagai ilmu administrasi atau *general management*.

Pendekatan manajemen menawarkan kerangka kerja yang lebih praktis dan terfokus pada teknik-teknik administrasi yang memerlukan

keahlian serta spesialisasi. Namun, pendekatan ini tidak mempermasalahkan dalam konteks institusi mana keahlian itu diterapkan, apakah di sektor publik, swasta, atau nirlaba. Seperti halnya dalam paradigma kedua, prinsipnya adalah bahwa administrasi adalah administrasi—tanpa memandang tempatnya beroperasi.

Masalah muncul ketika administrasi publik justru kehilangan keunikan dan identitasnya sebagai disiplin yang berakar pada sektor pemerintahan. Dalam kerangka manajerial yang lebih luas, ia larut ke dalam konsep umum manajemen, sehingga aspek-aspek khusus yang membedakan administrasi publik dari bentuk administrasi lainnya menjadi kabur.

Tahun 1956 menandai tonggak penting dalam paradigma ini dengan lahirnya jurnal *Administrative Science Quarterly*, yang lahir dari gagasan bahwa membedakan administrasi publik, privat, dan nonprofit dianggap tidak lagi relevan. Tokoh-tokoh kunci dalam mendorong perkembangan paradigma ini antara lain Edward Litchfield dan John D. Millett, yang mendorong integrasi administrasi publik ke dalam pendekatan manajerial yang lebih universal.

Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik
(Sejak 1970)

Memasuki dekade 1970-an, dunia akademik dan praktisi mulai menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar terhadap administrasi publik sebagai disiplin yang mandiri. Kepercayaan ini ditandai dengan

upaya memisahkan administrasi publik dari dua kutub dominan sebelumnya manajemen dan ilmu politik. Luther Gulick bahkan menegaskan hal ini melalui tulisannya yang berjudul "*Public Administration as Neither Management Nor Political Science*," menyoroti perlunya memposisikan administrasi publik sebagai bidang yang berdiri sendiri.

Momentum penting lainnya adalah berdirinya *The National Association of Schools of Public Affairs and Administration* (NASPAA) pada tahun 1970. Organisasi ini menjadi wadah bagi universitas dan perguruan tinggi yang memiliki program studi utama di bidang administrasi publik. Lebih dari sekadar asosiasi akademik, pembentukan NASPAA merepresentasikan pengakuan formal terhadap administrasi publik sebagai disiplin ilmu tersendiri, lengkap dengan kriteria akreditasi akademik dan pengembangan kurikulum yang khas.

Sejak saat itu, administrasi publik tidak lagi didefinisikan dari disiplin lain, melainkan dari dirinya sendiri. Lokusnya terletak pada isu-isu publik dan kepentingan masyarakat, sementara fokus keilmuannya mencakup teori organisasi, manajemen publik, kebijakan publik, dan ekonomi politik. Dengan demikian, paradigma kelima menandai titik balik di mana administrasi publik menemukan pijakan otonom dalam lanskap keilmuan.

Paradigma 6: *Era Governance* (Sejak 1990–Sekarang)

Memasuki era 1990-an, administrasi publik mengalami transisi menuju pendekatan *governance*, yang lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, kolaborasi lintas sektor, dan keberlanjutan pelayanan publik. *Governance* tidak lagi sekadar berbicara tentang bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, tetapi juga bagaimana pemerintah berinteraksi dan bermitra dengan berbagai aktor baik dari sektor privat, masyarakat sipil, maupun lembaga non-pemerintah.

Menurut Ikeanyibe (2017), dalam konteks *governance*, peran penyedia layanan (*service providers*) bersifat dinamis mereka menjalankan fungsi operasional, sementara pemerintah berperan sebagai pengarah dan pengoordinasi. Hal ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan birokratis ke pola kerja yang lebih kolaboratif dan desentralistik. Gibson, juga dikutip oleh Ikeanyibe, menyebut bahwa *governance* adalah proses pemerintahan yang dibangun atas dasar kemitraan antar sektor publik, privat, dan sosial.

Sejalan dengan itu, Denhardt dan Denhardt (dalam Ahmad, 2012) memetakan perkembangan paradigma administrasi publik ke dalam beberapa fase: dari *Old Public Administration* (OPA) yang birokratis dan hirarkis, menuju *New Public Management* (NPM) yang mengadopsi prinsip efisiensi pasar, kemudian berkembang menjadi *New Public Service* (NPS) yang berorientasi pada pelayanan warga negara, hingga akhirnya sampai pada kerangka *Good Governance*, yang menekankan partisipasi,

transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai demokratis. Paradigma *governance* ini menegaskan bahwa administrasi publik modern harus dijalankan secara inklusif dan adaptif, menjawab tantangan kompleks masyarakat kontemporer melalui sinergi lintas sektor dan orientasi pada kepentingan publik yang lebih luas.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut pandangan Prof. DR. H. Sunarto, Msi (2014) adalah keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Kebijakan ini bersifat mengikat dan harus dibuat oleh pemegang otoritas yang mendapat mandat dari rakyat. Setelah ditetapkan, kebijakan publik dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti peraturan, anggaran, dan struktur pelaksanaannya. Prosesnya meliputi pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi, di mana keterlibatan publik menjadi indikator kepatuhan pemerintah terhadap aspirasi rakyat. Setelah kebijakan dibuat, penting bagi masyarakat untuk memahami agenda kebijakan dan memiliki kesempatan memberikan masukan terhadap isinya.

Menurut Nugroho (2004), kebijakan publik merupakan bentuk kebijakan yang secara prinsip ditujukan untuk memenuhi dan melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, sejak tahap perumusan hingga implementasinya, kebijakan publik harus didasarkan pada orientasi terhadap kepentingan masyarakat secara luas, serta mengesampingkan

kepentingan pribadi, kelompok, politik, maupun ekonomi yang bersifat sektoral.

Kebijakan publik, dalam pandangan tersebut, harus disusun dengan memperhatikan nilai-nilai kolaboratif dan empatik terhadap publik, baik dalam dimensi yuridis-formal, rasionalitas kognitif, maupun nilai-nilai normatif yang mendasarinya. Hal ini menandakan bahwa proses penyusunan kebijakan publik tidak sekadar bersifat teknokratis, melainkan juga memerlukan integritas moral serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Menurut Thomas R. Dye dalam pendapatnya yang dikutip oleh Subarsono (2011:02), kebijakan publik mencakup segala tindakan yang diputuskan oleh pemerintah, baik untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Dye menegaskan bahwa ketika pemerintah mengambil suatu tindakan, harus ada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan publik bukan hanya sekadar pernyataan atau keinginan dari pemerintah atau pejabatnya, melainkan mencakup seluruh tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut William N. Dunn, sebagaimana dikutip oleh Harbani Pasolong (2011:29), kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang saling berkaitan dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Kebijakan ini berkaitan dengan berbagai tugas pemerintahan di berbagai

bidang, seperti pertahanan dan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, serta bidang lainnya.

Secara umum, kebijakan publik dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama. Pertama, kebijakan regulatif (*regulatory*), yakni kebijakan yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat melalui ketentuan hukum yang mengikat. Kedua, kebijakan redistributif (*redistributive*), yaitu kebijakan yang berfokus pada upaya pendistribusian ulang sumber daya atau kekayaan, umumnya dari kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan ekonomi kepada kelompok yang secara ekonomi kurang beruntung, sebagai bentuk intervensi negara dalam menciptakan keadilan sosial.

Ketiga, kebijakan distributif (*distributive*), yaitu kebijakan yang memberikan akses atau alokasi sumber daya tertentu secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Keempat, kebijakan konstituen (*constituent*), yaitu kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat struktur dan fungsi kelembagaan negara, termasuk perlindungan terhadap integritas dan eksistensi negara itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan pengertian implementasi kebijakan dari para ahli, implementasi kebijakan merupakan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan untuk negara dan merupakan prosedur yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

1.5.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh otoritas yang secara legal memperoleh mandat dari negara. Secara esensial, implementasi mencerminkan upaya untuk mewujudkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Tacjhan, sebagaimana dikutip oleh Arifin Thahir (2011:53), menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif yang dilaksanakan oleh aparatur birokrasi dalam kerangka proses kebijakan, tetapi juga merupakan salah satu objek kajian penting dalam ilmu administrasi publik. Dengan demikian, implementasi memiliki dimensi praktis sekaligus akademis yang saling melengkapi dalam konteks manajemen kebijakan publik.

Menurut Van Meter dan Van Horn, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2008:146), implementasi kebijakan dipahami sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor individu maupun kelompok dalam lingkungan pemerintahan, yang diarahkan untuk merealisasikan tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan yang telah disahkan sebelumnya. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan tidak dapat dimulai sebelum terdapat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui suatu keputusan kebijakan. Oleh karena itu, proses implementasi kebijakan baru dapat dilaksanakan secara efektif apabila telah terdapat landasan hukum yang sah serta ketersediaan sumber daya, khususnya pendanaan, guna mendukung realisasi program yang dimaksud.

Menurut Riant Nugroho (2011:618), implementasi kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu cara untuk memastikan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat mencapai tujuannya secara tepat, tanpa penyimpangan. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu secara langsung dalam bentuk program, atau melalui perumusan kebijakan turunan (derivat) dari kebijakan utama. Dalam konteks Program Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang), implementasinya dapat dianalisis menggunakan indikator efektivitas implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Riant Nugroho (2014:686), yakni melalui lima aspek ketepatan: tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Mengemukakan bahwa keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat melalui “lima tepat” yaitu

1. Tepat Kebijakan

Indikator ini menekankan bahwa kebijakan publik harus secara substansial mencerminkan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Sebuah kebijakan dianggap tepat apabila tujuan yang dirumuskan mampu dicapai melalui pelaksanaan program, serta memberikan dampak yang positif secara nyata. Artinya, kebijakan tersebut harus memiliki relevansi tinggi terhadap persoalan yang diangkat dan secara efektif menjawab kebutuhan masyarakat.

2. Tepat Pelaksana

Pelaksana kebijakan merupakan aktor yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan isi kebijakan. Ketepatan pelaksana mencakup kecocokan antara kapasitas, kewenangan, dan peran aktor tersebut dengan kompleksitas kebijakan yang diimplementasikan. Aktor pelaksana dapat berupa instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Tepat Target

Indikator ini menilai sejauh mana kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan telah sesuai dengan perumusan tujuan awal kebijakan. Ketepatan sasaran juga mencakup keselarasan antara intervensi kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat serta keterpaduannya dengan program atau kebijakan lain yang berjalan. Dengan demikian, kebijakan akan lebih efektif apabila target yang dituju benar-benar merupakan kelompok yang membutuhkan intervensi tersebut dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

4. Tepat Lingkungan

Lingkungan kebijakan mencakup konteks sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan di mana kebijakan tersebut dijalankan. Ketepatan lingkungan merujuk pada kecocokan kebijakan dengan kondisi faktual yang ada, serta hubungan interaktif yang baik antara lembaga

perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan aktor-aktor terkait lainnya. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat efektivitas implementasi dan memperkecil risiko resistensi atau konflik kepentingan.

5. Tepat Proses

Indikator terakhir menekankan pada kesesuaian prosedural dalam pelaksanaan kebijakan. Proses implementasi harus dirancang sedemikian rupa agar para pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya secara jelas, serta kelompok sasaran dapat menerima dan memahami manfaat dari kebijakan tersebut. Ketepatan proses mencakup aspek kesiapan teknis, administratif, serta kesiapan sosial dari pelaksana dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

1.5.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi

Pelaksanaan sebuah program atau kebijakan tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Van Meter dan Van Horn (1975), pada implementasi terdapat enam indikator faktor pendorong dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Standar dan sasaran

Mencakup sasaran kebijakan yang ingin dicapai serta standar yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya. Standar ini penting

sebagai pedoman pelaksanaan agar kebijakan berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan pelaksanaan yang optimal.

2. Sumber daya

Dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun non-manusia, merupakan prasyarat penting dalam proses implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Dukungan tersebut mencakup ketersediaan sumber daya finansial, waktu, serta sarana dan prasarana yang memadai, yang secara keseluruhan berperan signifikan dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Variabel ini diuraikan dengan penjelasan mengenai karakteristik yang dimiliki dari masing-masing pelaksana program (kesesuaian antara tupoksi dari birokrasi dengan tugas sebagai pelaksana program) dan struktur organisasi pelaksana yang dapat dilihat dari hubungan antar organisasi yang telah diuraikan sebelumnya sehingga terlihat struktur hierarki yang jelas antar pelaksana program.

4. Disposisi implementor

Dalam hal ini terkait dengan sikap maupun perilaku pelaksana kebijakan, yang mana hal tersebut tentunya sangat penting karena

dapat menciptakan efektivitas sehingga keberjalanan kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

5. Komunikasi antar organisasi terkait

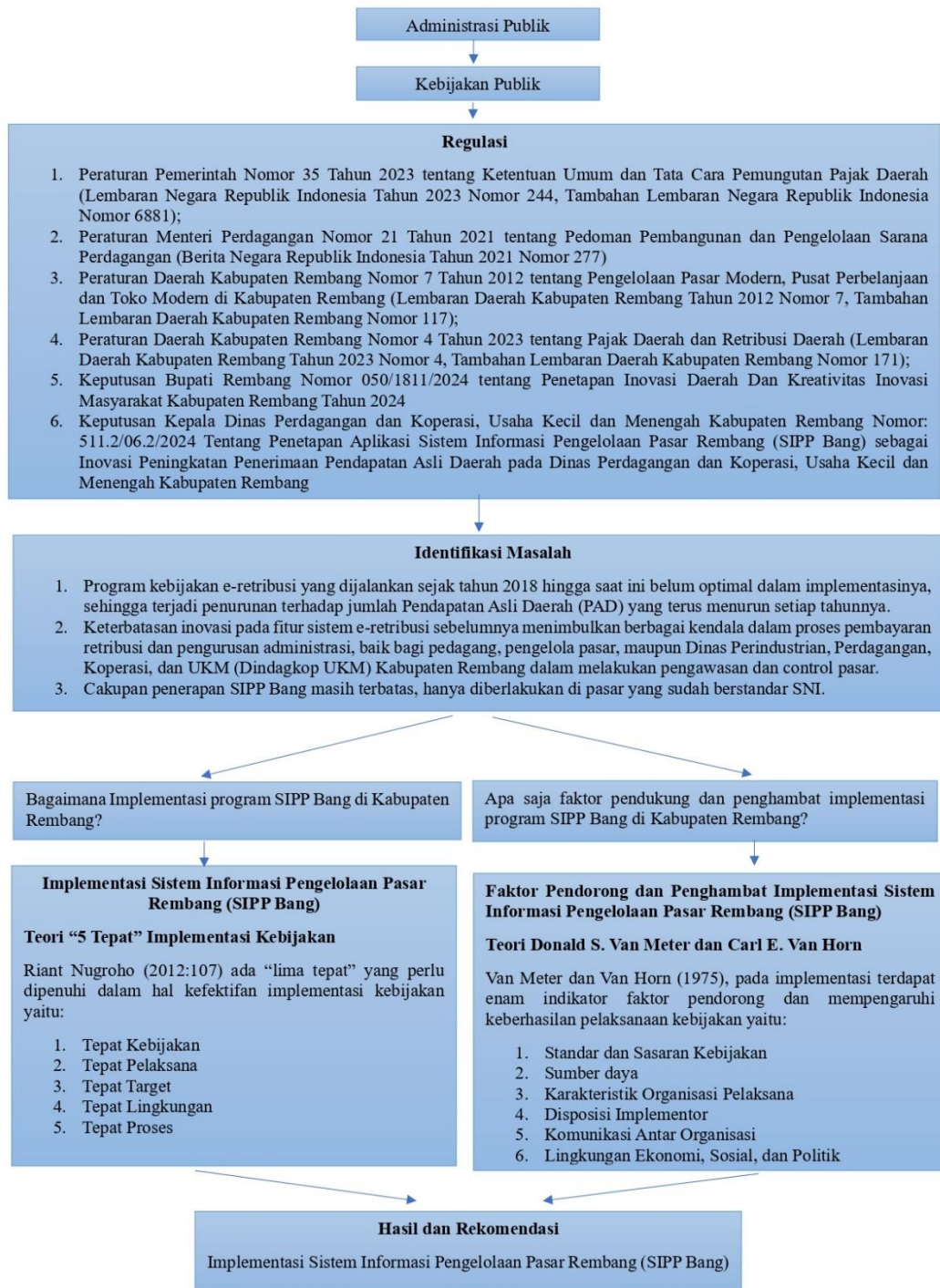
Koordinasi dan komunikasi yang baik dari instansi pelaksana program, dapat mendorong keberhasilan dari implementasi suatu program. Dalam hal ini, hubungan antar organisasi dijelaskan dengan menguraikan peran dan hubungan yang terjalin dari setiap tingkatan pelaksana program kebijakan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Variabel ini memperhatikan beberapa faktor termasuk dukungan sumber daya ekonomi, dampak kebijakan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, tanggapan politisi, dan dukungan elite terhadap kebijakan yang dirumuskan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, terdapat enam jenis faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat

1.5.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana cara peneliti menjawab tujuan dari penelitian, berdasarkan perancangan yang ditetapkan oleh peneliti untuk mengeksplorasi masalah melalui pengumpulan data dan informasi terkait implementasi kebijakan program SIPP Bang di Kabupaten Rembang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori lima tepat dalam keefektifan implementasi kebijakan dari Riant Nugroho (2011:618) dan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975) dengan menggunakan enam indikator. Maka dari itu operasionalisasi konsep pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang) Kabupaten Rembang adalah proses pelaksanaan kebijakan berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan retribusi pasar. Program ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non-Tunai APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai langkah perbaikan dan inovasi dari program sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, implementasi SIPP Bang mengacu pada prinsip "5 Tepat", yaitu:

- a. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan adalah kebijakan dibuat untuk memecahkan permasalahan yang harus dipecahkan. Proses pencapaian tujuan dari Program Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang) Kabupaten Rembang mampu secara efektif menjawab permasalahan

dan mencapai tujuan, serta memberikan dampak positif dalam pelaksanaannya. Program Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang) Kabupaten Rembang dapat diukur dari gejala:

- 1) Kebijakan yang dibuat dapat memecahkan masalah transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Rembang.
- 2) Kebijakan sesuai dengan masalah penurunan jumlah pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Rembang

b. Tepat Pelaksana

Tepat pelaksana adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Program Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang) Kabupaten Rembang. Tepat pelaksana mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat dijalankan oleh pelaksana yang tepat, yang bisa berupa pemerintah, maupun kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta. Tepat pelaksana kebijakan Program Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang) Kabupaten Rembang dapat diukur dari gejala Peran masing-masing pelaksana *stakeholder* dalam Program SIPP Bang.

c. Tepat Target

Tepat target menganalisis apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang tujuan kebijakan, serta respon target Program Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang) Kabupaten Rembang tidak

bertentangan dengan program maupun kebijakan lain. Tepat target dapat diukur dari gejala:

- 1) Tepat sasaran dalam penelitian ini dilihat melalui implementasi sudah sesuai dengan sasaran yang direncanakan atau belum, apakah terdapat tumpang tindih, dan apakah berpotensi bertentangan dengan kebijakan lain atau tidak.
- 2) Kesiapan sasaran dalam penelitian ini dilihat melalui sasaran siap diintervensi atau tidak, kondisi sasaran berada dalam konflik atau keadaan damai, serta apakah sasaran mendukung atau menolak pelaksanaan implementasi Program SIPP Bang.
- 3) Kondisi kebijakan dalam penelitian ini dilihat melalui implementasi Program SIPP Bang apakah bersifat inovatif atau menggantikan/melanjutkan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

d. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan merujuk pada kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan konteks lingkungan kebijakan yang melingkupinya. Lingkungan kebijakan mencakup berbagai aktor, institusi, serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, interaksi yang konstruktif antara lembaga perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, dan lembaga-lembaga lain yang terkait menjadi indikator penting dari ketepatan lingkungan.

Tepat lingkungan dapat diukur melalui sejumlah gejala, antara lain:

- 1) Lingkungan internal dalam penelitian ini dilihat melalui interaksi antara lembaga yang merumuskan kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang berkaitan dengan implementasi Program SIPP Bang.
- 2) Lingkungan eksternal dalam penelitian ini dilihat melalui persepsi publik terhadap kebijakan, terutama dukungan kelompok sasaran yang memiliki peran penting terhadap pelaksanaan implementasi Program SIPP Bang.

e. Tepat Proses

Tepat proses umumnya dijalankan melalui tiga tahap, yang pertama adalah tahap pemahaman kebijakan. Tahap pertama adalah pemahaman kebijakan, di mana masyarakat melihat kebijakan sebagai aturan yang harus diikuti, sementara pemerintah menganggapnya sebagai tugas yang harus dijalankan. Tahap kedua adalah penerimaan kebijakan, di mana masyarakat mulai menerima kebijakan sebagai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah melihatnya sebagai kewajiban yang harus diimplementasikan. Tahap ketiga berhubungan dengan kesiapan strategis, di mana masyarakat mulai bersiap untuk menjalankan atau berpartisipasi dalam kebijakan tersebut, sementara birokrat siap untuk melaksanakan kebijakan secara operasional.

Program Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang) Kabupaten Rembang. Tepat proses dapat diukur dari gejala:

- 1) Pemahaman. Pemahaman dalam penelitian ini dilihat melalui pemahaman para pelaksana kebijakan pada pelaksanaan implementasi SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang.
 - 2) Penerimaan. Penerimaan dalam penelitian ini dilihat melalui penerimaan para pelaksana kebijakan pada pelaksanaan implementasi SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang.
 - 3) Kesiapan. Kesiapan dalam penelitian ini dilihat melalui kesiapan para pelaksana pada pelaksanaan implementasi SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang.
2. Pelaksanaan sebuah program atau kebijakan tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Van Meter dan Van Horn (1975), pada implementasi terdapat enam indikator faktor pendorong dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu:
- a. Standar dan sasaran

Mencakup sasaran kebijakan yang ingin dicapai serta standar yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya. Standar ini penting sebagai pedoman pelaksanaan agar kebijakan berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan pelaksanaan yang optimal. Gejala yang dapat diukur di lapangan yaitu:

 - 1) Kejelasan standar yang digunakan sebagai pedoman implementasi Program SIPP Bang Kabupaten Rembang.

2) Kejelasan sasaran Program SIPP Bang Kabupaten Rembang

b. Sumber daya

Adanya dukungan sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, yang meliputi sumber daya finansial, sumber daya waktu, serta sumber daya sarana dan prasarama diperlukan dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi untuk dapat menunjang kelancaran implementasi kebijakan. Sumber daya dalam penelitian ini diukur dari gejala sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia atau unit pelaksana Program SIPP Bang Kabupaten Rembang.
- 2) Sumber daya finansial yang menunjang keberjalanan Program SIPP Bang Kabupaten Rembang.
- 3) Sumber daya sarana dan prasarana penunjang Program SIPP Bang Kabupaten Rembang.
- 4) Sumber daya waktu yang dibutuhkan selama keberjalanan Program SIPP Bang Kabupaten Rembang.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Variabel ini diuraikan dengan penjelasan mengenai karakteristik yang dimiliki dari masing-masing pelaksana program (kesesuaian antara tupoksi dari birokrasi dengan tugas sebagai pelaksana program) dan struktur organisasi pelaksana yang dapat dilihat dari hubungan antar organisasi yang telah diuraikan sebelumnya sehingga terlihat struktur hierarki yang jelas antar pelaksana program. Gejala yang dapat diukur

di lapangan yaitu: Norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi organisasi pelaksana Program SIPP Bang Kabupaten Rembang.

d. Disposisi implementor

Dalam hal ini terkait dengan sikap maupun perilaku pelaksana kebijakan, yang mana hal tersebut tentunya sangat penting karena dapat menciptakan efektivitas sehingga keberjalanan kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target. Gejala yang dapat diukur di lapangan yaitu:

- 1) Respon implementor terhadap Program SIPP Bang Kabupaten Rembang
- 2) Kognisi atau pemahaman implementor terhadap Program SIPP Bang Kabupaten Rembang
- 3) Intensitas atau preferensi nilai yang dimiliki implementor Program SIPP Bang Kabupaten Rembang

e. Komunikasi antar organisasi terkait

Koordinasi dan komunikasi yang baik dari instansi pelaksana program, dapat mendorong keberhasilan dari implementasi suatu program. Dalam hal ini, hubungan antar organisasi dijelaskan dengan menguraikan peran dan hubungan yang terjalin dari setiap tingkatan pelaksana Program Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang (SIPP Bang). Gejala yang dapat diukur di lapangan yaitu:

- 1) Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam implementasi Program SIPP Bang Kabupaten Rembang
- 2) Koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah dengan pengelola Program SIPP Bang Kabupaten Rembang

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Variabel ini memperhatikan beberapa faktor termasuk dukungan sumber daya ekonomi, dampak kebijakan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, tanggapan politisi, dan dukungan elite terhadap kebijakan yang dirumuskan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam penelitian ini diukur dari gejala sebagai berikut:

- 1) Lingkungan ekonomi yaitu sumber daya ekonomi pendukung keberhasilan Program SIPP Bang Kabupaten Rembang
- 2) Lingkungan sosial, berupa dukungan publik dan kelompok kepentingan terhadap implementasi Program SIPP Bang Kabupaten Rembang
- 3) Lingkungan politik, tanggapan dan tindakan elite politik implementasi Program SIPP Bang Kabupaten Rembang.

Tabel 1. 6 Operasionalisasi Konsep

No	Fokus	Gejala	Sub Gejala
1.	Implementasi Program “SIPP BANG” (Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang) Di Kabupaten Rembang	a) Tepat Kebijakan	• Tepat pemecahan masalah/ isu (Kebijakan yang dibuat dapat memecahkan masalah transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Rembang.) • Kesesuaian perumusan masalah/isu (Kebijakan sesuai dengan masalah penurunan jumlah pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Rembang)
		b) Tepat Pelaksana	• Pengaruh pelaksana lembaga lain terhadap kebijakan (Peran masing-masing pelaksana <i>stakeholder</i> dalam Program SIPP Bang)
		c) Tepat Target	• Sasaran implementasi kebijakan (Tepat sasaran dalam penelitian ini dilihat melalui implementasi sudah sesuai dengan sasaran yang direncanakan atau belum, apakah terdapat tumpang tindih, dan apakah berpotensi bertentangan dengan kebijakan lain atau tidak.) • Kesiapan sasaran (Kesiapan sasaran dalam penelitian ini dilihat melalui sasaran siap diintervensi atau tidak, kondisi sasaran berada dalam konflik atau keadaan

No	Fokus	Gejala	Sub Gejala
			damai, serta apakah sasaran mendukung atau menolak pelaksanaan implementasi Program SIPP Bang) Kondisi Kebijakan (Kondisi kebijakan dalam penelitian ini dilihat melalui implementasi Program SIPP Bang apakah bersifat inovatif atau menggantikan/melanjutkan kebijakan yang telah ada sebelumnya)
		d) Tepat Lingkungan	- Lingkungan internal. (Lingkungan internal dalam penelitian ini dilihat melalui interaksi antara lembaga yang merumuskan kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang berkaitan dengan implementasi Program SIPP Bang.) - Lingkungan eksternal. (Lingkungan eksternal dalam penelitian ini dilihat melalui persepsi publik terhadap kebijakan, terutama dukungan kelompok sasaran yang memiliki peran penting terhadap pelaksanaan implementasi Program SIPP Bang.)
		e) Tepat Proses	- Pemahaman. Pemahaman dalam penelitian ini dilihat melalui pemahaman para pelaksana kebijakan pada pelaksanaan implementasi SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang. - Penerimaan. Penerimaan dalam penelitian ini dilihat melalui penerimaan para pelaksana kebijakan pada pelaksanaan implementasi

No	Fokus	Gejala	Sub Gejala
			SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang. • Kesiapan. Kesiapan dalam penelitian ini dilihat melalui kesiapan para pelaksana pada pelaksanaan implementasi SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang.
2.	Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program “SIPP BANG” (Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang) Di Kabupaten Rembang	a) Standar dan sasaran	• Kejelasan standar yang digunakan sebagai pedoman implementasi Program SIPP Bang Kabupaten Rembang. • Kejelasan sasaran Program SIPP Bang Kabupaten Rembang
		b) Sumber daya	• Sumber daya manusia atau unit pelaksana Program SIPP Bang Kabupaten Rembang. • Sumber daya finansial yang menunjang keberhasilan Program SIPP Bang Kabupaten Rembang • Sumber daya sarana dan prasarana penunjang Program SIPP Bang Kabupaten Rembang • Sumber daya waktu yang dibutuhkan selama keberhasilan Program SIPP Bang Kabupaten Rembang
		c) Karakteristik organisasi pelaksana	• Norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi organisasi pelaksana Program SIPP Bang Kabupaten Rembang

No	Fokus	Gejala	Sub Gejala
		d) Disposisi implementor	• Respon implementor terhadap Program SIPP Bang Kabupaten Rembang • Kognisi atau pemahaman implementor terhadap Program SIPP Bang Kabupaten Rembang • Intensitas atau preferensi nilai yang dimiliki implementor Program SIPP Bang Kabupaten Rembang
		e) Komunikasi antar organisasi terkait	• Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam implementasi kebijakan Program SIPP Bang Kabupaten Rembang • Koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah dengan pengelola Program SIPP Bang Kabupaten Rembang
		f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	• Lingkungan ekonomi yaitu sumber daya ekonomi pendukung keberhasilan Program SIPP Bang Kabupaten Rembang • Lingkungan sosial, berupa dukungan publik dan kelompok kepentingan terhadap implementasi Program SIPP Bang Kabupaten Rembang • Lingkungan politik, tanggapan dan tindakan elite politik implementasi Program SIPP Bang Kabupaten Rembang

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan dalam implementasi kebijakan e-retribusi pengelolaan retribusi pasar di sejumlah daerah Indonesia mengalami penurunan pemasukan setiap

tahunnya, masalah tersebut berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing Kabupaten/Kota. Dengan berkembangnya teknologi dalam administrasi pemerintahan, digitalisasi sistem retribusi pasar telah menjadi fokus dalam berbagai penelitian sebelumnya.

Studi-studi terdahulu mengenai e-retribusi menekankan manfaat digitalisasi dalam meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kebocoran pendapatan, serta menyederhanakan proses administrasi bagi pedagang dan pengelola pasar. Namun, penerapan e-retribusi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi dari pengguna, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pedagang.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada digitalisasi retribusi pasar, penelitian ini berfokus pada inovasi dari kebijakan e-retribusi yang sebelumnya yaitu SIPP Bang (Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang) yang memiliki cakupan lebih luas. Selain mengelola sistem pembayaran retribusi, SIPP Bang juga mencakup pendataan dan perpanjangan kartu tanda pedagang, terdapat fitur daftar pelanggaran yang tercatat otomatis oleh sistem, serta pemantauan dan informasi lapak yang aktif dan non aktif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana implementasi program ini dibandingkan dengan sistem e-retribusi yang telah diterapkan di berbagai daerah, termasuk dalam hal kendala teknis serta penerimaan dari pengguna.

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Strategi penelitian memiliki peran penting dalam sebuah penelitian karena membantu peneliti dalam menjalankan proses penelitian dengan lebih terarah. Selain itu, strategi yang tepat juga dapat meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada filsafat dan digunakan untuk meneliti dalam kondisi ilmiah (eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara teknik pengumpulan serta analisis data dilakukan secara kualitatif dengan lebih menekankan pada pemaknaan dari hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendalami fenomena yang sedang diteliti. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya melakukan observasi, tetapi juga berinteraksi langsung dengan subjek penelitian dalam lingkungan alaminya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih kaya dan mendalam serta memahami makna yang tersembunyi di balik perilaku dan tindakan subjek penelitian (Creswell, 2014:4).

1.8.2 Situs penelitian

Situs penelitian merupakan lokus dalam suatu studi, yaitu lokasi atau wilayah tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam penelitian ini, lokus yang dipilih adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang. Alasan pemilihan lokasi ini dengan

pertimbangan dari pengamatan peneliti bahwa berdasarkan sumber berita terpercaya masih ditemukan permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian yang diangkat. Selain itu, pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan biaya, waktu, dan letaknya yang strategis serta mudah dijangkau oleh peneliti.

1.8.3 Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), subjek penelitian merujuk pada individu atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik sebagai informan maupun narasumber, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian berperan sebagai sampel yang dapat memberikan data serta menjelaskan karakteristik dari objek yang sedang diteliti. Subjek dalam penelitian akan berperan sebagai informan yang menentukan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah:

- 1) Kepala Bidang Pasar, Dinas Koperasi dan Perdagangan, UKM Kabupaten Rembang.
- 2) Staf Pelaksana Bidang Pasar, Dinas Koperasi dan Perdagangan, UKM Kabupaten Rembang.
- 3) Kepala Pasar Sumber Kabupaten Rembang
- 4) Pengelola serta petugas pemungut retribusi Pasar Sumber Kabupaten Rembang
- 5) Pedagang Pasar di Pasar Sumber Kabupaten Rembang

Untuk subjek pengguna Pasar Tradisional Kabupaten Rembang, peneliti menggunakan teknik *NonProbability Insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:96).

1.8.4 Jenis Data

Peneliti menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi sehingga memerlukan analisa mendalam yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Dalam memperoleh data kualitatif, metode pengumpulan data dapat melibatkan dokumentasi, wawancara, dan observasi.

1.8.5 Sumber Data

Implementasi SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang melibatkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, yang melibatkan pengamatan langsung atau observasi dan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan. Berkaitan informan pada penelitian Implementasi SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang.

b. Data sekunder

Data sekunder didapat secara tidak langsung dari lapangan, melibatkan penggunaan sumber informasi, seperti kepustakaan, media elektronik dan

internet, serta jurnal yang berkaitan dengan Implementasi SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai tempat, sumber, dan dengan berbagai metode. Tempat pengumpulan data dapat mencakup lingkungan alam, rumah responden, atau lokasi lainnya yang relevan. Berdasarkan sumbernya, data dapat diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, observasi (pengamatan), atau kombinasi dari ketiganya, tergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan informan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara guna memastikan konsistensi data yang diperoleh. Informasi yang didapat melalui wawancara berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil penelitian.

2. Observasi

Observasi yakni suatu mekanisme yang telah disusun dari beberapa mekanisme biologis maupun psikologis dimana yang paling penting ialah berbagai proses ingatan maupun pengamatan. Di dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati langsung pada pelaksanaan

Implementasi SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari berbagai catatan yang ada pada lokasi penelitian yaitu Kabupaten Rembang dan juga berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Penerapan metode ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh data yang lebih rinci dan tepat, serta dapat menjadi pendukung bagi hasil dari wawancara dan observasi.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung dan setelah penyelesaian pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian mengenai Implementasi SIPP Bang dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Rembang, digunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini melibatkan deskripsi dari data yang diperoleh melalui dokumen dan survei di instansi serta lapangan. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018) mengutarakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif secara langsung dan interaktif hingga data dianggap sudah mencapai titik kejenuhan, yang mencakup langkah – langkah berikut:

a. Pengumpulan data

Pada penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dalam rentang waktu sehari-hari atau berbulan-bulan, bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data.

b. Reduksi Data

Reduksi data yakni memfokuskan dan meringkas berbagai hal penting yang berkenaan dengan implementasi kebijakan ini.

c. Penyajian

Data Penyajian data yakni aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan unsur informasi secara singkat baik berupa hubungan kategori ataupun bagan sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai informasi yang didapat terkait pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penelitian ini.

d. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses awal dalam merumuskan interpretasi sementara terhadap temuan penelitian, yang masih dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti kuat dari tahapan pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan tersebut terbukti konsisten dan relevan berdasarkan data yang terkumpul secara menyeluruh, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan valid dan kredibel.

1.8.8 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2018), terdapat beberapa teknik untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data dalam penelitian kualitatif, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi,

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan salah satu dari metode tersebut untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi dan fakta yang ada di lapangan. yaitu :

1. Trianggulasi

Menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2018), cross validation bersifat kualitatif. Dengan menilai kecukupan data berdasarkan kovergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data. Dalam pengujian kredibilitas ini, triangulasi didefinisikan sebagai pengujian data dari hal – hal berikut :

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa keandalan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan strategi untuk menilai keandalan data, di mana berbagai metode digunakan untuk mengevaluasi informasi yang berasal dari sumber yang sama.

c. Triangulasi waktu

Kredibilitas data dapat diuji melalui wawancara, observasi, atau metode lain yang diterapkan dalam berbagai situasi atau waktu. Jika pemeriksaan

mengindikasikan ketidaksesuaian data, proses pemeriksaan perlu diulang secara berulang hingga kepastian terhadap data dapat ditemukan.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang mana pada penelitian ini membutuhkan validasi kebenaran yang diperoleh melalui beberapa sumber yang meliputi melakukan wawancara dengan narasumber atau informan yang telah ditentukan, melakukan observasi terkait implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah, serta dokumentasi pribadi terkait penelitian.